

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang sangat krusial dalam suatu negara salah satunya mengenai bidang ekonomi. Masalah kesejahteraan manusia erat kaitannya dengan ekonomi. Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini merupakan suatu hal yang nyata. Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang sulit dipecahkan (Gojali,2024)

Suatu negara diindikasikan sebagai suatu negara maju dilihat dari majunya perekonomian serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengentaskan perekonomian negara, pemerintah mengupayakan berbagai upaya salah satunya dengan menciptakan program-program yang dapat meningkatkan kualitas perekonomian. Zakat menjadi salah satu upaya dan kerja pemerintah dalam rangka mengurangi, meningkatkan serta membangun perekonomian daerah. Indonesia adalah salah satu negara Muslim dengan populasi terbesar di dunia yang mempunyai potensi zakat yang signifikan (Yulianti & Setiawan, 2021).

Pengelolaan zakat ini dimaksudkan untuk sebuah perkembangan pada realitas ekonomi dan sosial umat Muslim di Indonesia. Zakat dapat berfungsi sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, zakat juga berperan dalam mencegah penumpukan harta pada segelintir orang saja. Sebagai

salah satu rukun Islam, zakat memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian umat Islam. Pengelolaan zakat yang baik akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sebab zakat ini dapat dijadikan sebagai sumber dana potensial yang berasal dari masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jika sebuah lembaga pengelola zakat berperan dengan baik dalam mengelola zakat, maka pengembangan sosial dan ekonomi umat Muslim akan meningkat kesejahteraannya. Secara demografis Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, dan Indonesia memiliki potensi zakat yang besar. Oleh sebab itu, penghimpunan zakat, infak, dan sadaqah harus dimaksimalkan dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan umat, terutama pasca pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi langkah awal dalam pengelolaan zakat yang berlaku secara nasional dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam keputusan tersebut dijelaskan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu mengumpulkan serta mendistribusikan zakat. Berdasarkan Undang-undang tersebut, terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat serta disahkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat (BAZ) sendiri terdiri dari BAZ tingkat pusat, provinsi, kota, dan kecamatan.

BAZNAS Kabupaten Majalengka merupakan lembaga pengelola zakat ditingkat kabupaten yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat. Dana zakat, infak, sedekah, dan donasi yang diterima oleh BAZNAS akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Adapun data dari laporan keuangan mengenai perhimpunan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Majalengka pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perhimpunan Dana ZIS

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	2020	Rp 22.778.414.219	
2.	2021	Rp 5.103.004.340	↓
3.	2022	Rp 11.068.463.160	↑
4.	2023	Rp 10.920.650.839	↓
5.	2024	Rp 16.439.000.000	↑

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Majalengka

Namun menurut data yang ada dari laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Majalengka tahun 2020 bahwa perhimpunan dana ZIS sebesar Rp 22.778.414.219. adapun pada tahun 2021 bahwa perhimpunan dana ZIS sebesar Rp 5.103.004.340 pada tahun ini terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun pada tahun 2022 bahwa perhimpunan dana ZIS sebesar Rp 11.068.463.160 mengalami kenaikan dari tahun 2021. Pada tahun 2023 bahwa perhimpunan dana ZIS sebesar Rp 10.920.650.839 mengalami penurunan dari tahun 2022. Adapun pada tahun 2024 bahwa perhimpunan dana ZIS sebesar Rp 16.439.000.000. Jadi, setiap tahunnya terjadi fluktuasi mengenai perhimpunan dana ZIS.

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa catatan terkait kurangnya konsistensi dalam penyajian laporan serta keterbatasan informasi yang dipublikasikan secara transparan kepada publik. Data tersebut menjadi perhatian penting mengingat pengelolaan zakat yang efektif sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat.

Perkembangan yang sangat cepat dari lembaga amil zakat dan lembaga keuangan telah menarik perhatian banyak pihak untuk mempelajari dan memahami lebih mendalam tentang hal tersebut. Kebutuhan akuntansi syariah semakin meningkat pesat seiring dengan berkembangnya transaksi lembaga syariah. Badan Amil Zakat sebagai lembaga yang mengemban tugas mengelola dana publik, dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana umat mempunyai kepentingan yang luas dan memiliki dampak besar. Oleh karenanya BAZ dituntut dapat memberikan informasi yang transparan, *balance* dan rata terhadap semua pemangku kepentingan.

Salah satu pertanggungjawaban atas kinerja keuangan suatu entitas atau pemerintahan salah satunya adalah laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 401 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah penyajian informasi terorganisir mengenai kondisi keuangan dan hasil kinerja suatu entitas atau perusahaan.

Laporan keuangan juga berfungsi sebagai informasi keuangan dalam sebuah perusahaan yang menggambarkan kinerja, kondisi keuangan, serta perkembangan dan hasil usaha perusahaan selama periode waktu tertentu (Subrahmanyam, 2010).

Penyusunan laporan keuangan tentunya harus dilakukan sesuai dengan standar yang benar dan tepat melalui proses audit oleh auditor independen karena hal ini akan memengaruhi pada opini yang diberikan auditor terhadap laporan keuangan tersebut guna memastikan bahwa informasi yang disajikan bebas dari kesalahan material, dapat dipercaya, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit independen memberikan jaminan objektivitas dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata para pemangku kepentingan, termasuk muzakki, pemerintah, dan masyarakat luas. Oleh karenanya diharuskan bagi setiap lembaga atau entitas untuk memenuhi kualitas laporan keuangan.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dengan penerapan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pihak *agent* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan berbagai aktivitas dan tanggungjawabnya terhadap pihak *principal* yang berhak meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002).

Semua proses ini diharapkan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan prinsip syariah. Dalam perspektif Islam akuntabilitas berarti setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

Selain akuntabilitas, transparansi juga perlu diterapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Transparansi adalah kewajiban

bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Prinsip transparansi dalam laporan keuangan ini sangat penting, tanpa adanya transparansi laporan keuangan bisa saja digelapkan yang kemudian dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan tersebut. Pada BAZ, transparansi diperlukan karena BAZ memiliki tugas untuk mengelola dana muzakki lalu kemudian dana tersebut disalurkan untuk diberikan kepada mustahik (Agoes dan Ardana 2009).

Dengan adanya prinsip keterbukaan dalam transparansi laporan keuangan yang ada di BAZ, mustahik dapat dengan mudah mengetahui dana yang disalurkan dan dikelola oleh BAZ. Hal ini berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakat pada BAZ. Maka dari itu, prinsip keterbukaan dalam BAZ harus lebih dioptimalkan.

Adanya akuntabilitas dan transparansi akan membuat laporan keuangan tersebut berkualitas sebab akuntabilitas ini berkaitan dengan suatu pertanggungjawaban dalam pengefektifan suatu kegiatan untuk mencapai target yang ditentukan dan transparansi yang bersifat terbuka dan jujur kepada pengguna laporan keuangan dengan tidak adanya keganjalan yang terselip sedikitpun.

Akuntabilitas ini memiliki pengaruh terhadap bagaimana laporan keuangan itu tersaji. Penyajian laporan yang baik adalah laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas juga pasti memiliki transparansi yang baik sebab tanpa adanya transparansi ini maka akan tersaji

laporan keuangan yang tertutup dan memiliki banyak kerahasiaan didalamnya sehingga laporan keuangan tersebut dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan yang hendak mengambil keputusan.

Permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pemerintahan daerah serta instansi dan lembaga daerah lainnya yang hingga kini terus menjadi fokus kajian oleh pemerintah. Fenomena ini tercermin dari banyaknya tuntutan agar organisasi publik termasuk unit kerja pemerintah, ditingkat pusat maupun daerah, menerapkan transparansi dan akuntabilitas secara lebih baik dalam pengelolaan dan pelaporan kegiatan mereka.

Permasalahan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Majalengka adalah kurangnya sistem pelaporan yang memadai dan transparan, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam akuntabilitas pengelolaan dana zakat. BAZNAS belum sepenuhnya menerapkan sistem pelaporan yang dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh publik mengenai penggunaan dana zakat.

Banyaknya informasi yang tidak terpublikasikan atau hanya terbatas pada dokumen tertentu yang sulit diakses oleh masyarakat menjadi kendala dalam transparansi. Hal ini mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh BAZNAS. Proses distribusi dan akses laporan keuangan masih terbatas pada pihak-pihak tertentu, bukan pada masyarakat luas yang berhak mendapatkan informasi tersebut. Ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi dalam pencatatan,

pengelompokkan dan pelaporan yang berlaku dapat mempengaruhi validitas laporan, serta menurunkan kualitas dan keandalan informasi yang diberikan kepada *stakeholder*.

Meningkatkan kualitas laporan keuangan di Baznas Kabupaten Majalengka adalah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Lembaga amil zakat sering menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas tinggi, seperti kompleksitas dalam mencatat dan melaporkan dana zakat yang beragam serta kurangnya sumber daya (Abdullah & Alkatiri, 2018).

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana akuntabilitas dan transparansi dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyaningsih N (2018) dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Zakat di Indonesia" yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Lembaga yang akuntabel menghasilkan laporan yang relevan dan dapat dipercaya. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, semakin baik kualitas laporan keuangan karena proses pelaporan yang transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang merupakan bukti empiris yang dilakukan oleh Azza Nur Zubaidah dan Nugraeni (2022) dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman” hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi lebih berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dibandingkan dengan akuntabilitas dalam konteks tersebut.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawardi Muhammad Shaleh dan rekan-rekannya (2023) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BAPENDA Kota Pekanbaru” hasil penelitian menunjukkan bahwa baik akuntabilitas maupun transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan, kedua variabel tersebut menjelaskan 61,1% variasi dalam kualitas laporan keuangan. Hal ini menegaskan pentingnya kedua aspek tersebut dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Puspita Dewi Wulaningrum dan Amin Pinanto (2022) dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZNAS dan LAZ Yogyakarta” hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan PSAK 409, sementara LAZ belum sepenuhnya menerapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi yang baik

berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan kajian penelitian terdahulu. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka” maka diperlukan batasan masalah sebagai fokus utama dalam kajian ini. Penelitian ini antara menggunakan dua variabel diantaranya variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri atas akuntabilitas dan transparansi. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Majalengka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Majalengka?

2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Majalengka?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Majalengka
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Majalengka
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Majalengka

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Toeritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat

memberikan masukan bagi pegawai BAZNAS Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi guna memperbaiki kualitas laporan keuangan dan mencegah potensi penyimpangan.

